

Komitmen Ciptakan Pilkades Konsel Damai, 272 Cakades Tandatangani Pakta Integritas

Konsel, SultraNET. | Sebagai bentuk komitmen dalam mensukseskan pesta demokrasi di desa, sebanyak 272 Calon Kepala Desa (Cakades) se-Kabupaten Konawe Selatan menandatangani Pakta Integritas di Auditorium Lantai III Kantor Bupati. Kamis, 14/9/2023.

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas untuk membangun komitmen bersama bagi semua calon kepala desa dan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkualitas aman dan damai.

Momentum penandatanganan itu, lanjutnya, agar dibutuhkan komitmen bersama dalam menjaga simpatisan untuk mensukseskan pesta demokrasi di desanya. Dimana pelaksanaan Pilkades di Konawe Selatan berjumlah 96 desa di 25 kecamatan dengan jumlah calon kepala desa sebanyak 272 orang .

“Pilkades serentak adalah amanah perundang-undangan. Dimana Konawe Selatan telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sejak tahun 2016, 2018 dan 2019, 2022 lalu. Tentunya kita sudah sangat dewasa dalam melaksanakan pesta demokrasi di desa. Dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas akan mengingatkan kembali komitmen mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkualitas, menjaga ketentraman dan ketertiban selama tahapan pemilihan berjalan,” terang Surunuddin.



Bupati Konse, H.Surunuddin Dangga

Dikesempatan itu, bupati dua periode ini berpesan kepada panitia pemilihan untuk tetap profesional, mengelola pemilihan secara transparan, berkualitas dan aman. Siapapun kepala desa yang terpilih merupakan putra-putri terbaik desa.

“Dukung mendukung dalam pemilihan merupakan hal wajar dalam kontestasi jabatan politis. Terpenting, penyampaian program pembangunan desa merupakan tawaran untuk mendapat simpati masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Anas Mas’ud menjelaskan, dari 26 tahapan Pildes yang ditetapkan, kini sudah masuk ditahapan ke 16 yaitu penandatanganan Pakta Integritas bagi Cakades se-Konawe Selatan.

“Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati no.32 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan dan kegiatan penandatanganan Pakta integritas dan dilaksanakan hari ini mengacu pada keputusan bupati no. 141/416 tahun 223 tentang penetapan hari dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Konawe Selatan” jelasnya

Dirinya berharap tahapan pemilihan kepala desa serentak ini dapat terselenggara dengan tertib, aman dan damai sampai pada hari pemungutan suara nantinya.

“Harapan selanjutnya tahapan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pada tanggal 24 September atau tahapan ke 20 yaitu pemungutan suara, kemudian tahapan terakhir Mei tahun 2024 yaitu pelantikan kepala desa terpilih dapat terselenggara dengan baik”, pungkas Anas. (DiskominfoKonsel)

Pj. Bupati Sukanto Toding sambangi Kejari Kolut

Kolaka Utara, SultraNET. | Pejabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, melakukan kunjungan penting ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara, yang mendapat sambutan hangat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Henderina Malo. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Rabu (13/9/2023)

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding menekankan signifikansi pengayoman dalam bidang hukum dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Beliau menggarisbawahi bahwa kerjasama erat antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, memiliki peran sentral dalam mencegah potensi masalah hukum yang dapat menghambat pembangunan daerah.

“Kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum adalah fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan Kolaka Utara.”
ujarnya

Wilayah Kolaka Utara, yang dikenal memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, juga menghadapi tantangan serius berupa tingginya tingkat kemiskinan dan stunting di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, Dr. Ir. Sukanto Toding menekankan perlunya pendampingan dan pengawalan yang kuat dalam

memaksimalkan pendapatan dari sektor pertambangan. Beliau mengusulkan pembentukan tim gabungan yang melibatkan kejaksaan dari tahap awal untuk menciptakan aturan bersama yang jelas.

“Kami perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa potensi tambang kita dimanfaatkan dengan baik, sambil memperhatikan dampak sosial yang adil bagi masyarakat.” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara, Henderina Malo, memberikan dukungan yang kuat terhadap proyek-proyek strategis pemerintah daerah. Beliau menyoroti pentingnya mendampingi pelaksanaan proyek agar serapan anggaran maksimal, sambil berharap agar proses perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan dengan baik, teratur, dan efisien.

“Kejaksaan Negeri siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis Kolaka Utara berhasil.” sebutnya

Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Henderina Malo, juga menegaskan betapa vitalnya kerjasama erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam upaya pencegahan masalah hukum. Ia menggarisbawahi bahwa tujuan utama adalah menciptakan tatanan yang baik dan tertib tanpa menghambat perkembangan daerah.

“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas hukum daerah ini,” ujar Beliau.

Henderina Malo juga menyatakan keyakinannya bahwa Kolaka Utara memiliki potensi yang luar biasa, dan Kejaksaan Negeri siap untuk mendampingi kapan pun diperlukan dalam tugas pencegahan dan penindakan.

“Pendampingan lebih baik daripada menindak, kami siap mendampingi jika diperlukan kapanpun,” tandasnya

PJ Bupati Bombana dan Inspektur Daerah Hadiri Rakor Penguatan APIP, Langkah Konkrit Pencegahan Korupsi

Bombana, SultraNET. | Dalam upaya pencegahan korupsi, PJ Bupati Bombana, Ir. H Burhanuddin, M.Si, didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara nasional, bertempat di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Rabu (13/9/2023).

Rakor ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah lanjutan dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Fokusnya adalah memperkuat peran APIP dalam mengawasi Program Pembangunan, dengan target memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor secara proporsional.

Menteri Dalam Negeri, Muh. Tito Karnavian, dalam pidatonya menekankan pentingnya pengawasan internal sebagai langkah kunci dalam mencegah potensi pelanggaran pidana atau administrasi di lembaga pemerintahan.

“APIP memiliki peran yang lebih luas selain hanya melakukan audit anggaran, mencakup juga penanganan mutasi, perilaku anggota, dan efisiensi anggaran,” ujarnya dengan tegas.

Rakor ini tidak hanya melibatkan kehadiran lebih dari 70 Kepala Daerah secara langsung, tetapi juga 480 peserta lainnya melalui platform Zoom Meeting. Kolaborasi antara Kemendagri, IPDN, STAN, dan KPK menjadi tonggak penting dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum atau administrasi.

“Memperkuat APIP merupakan salah satu upaya vital dalam domain program utama KPK untuk pencegahan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah hukum, mengutamakan penguatan pencegahan sebagai

prinsip utama,” tegas Tito Karnavian mengakhiri sambutannya.

Pertemuan ini bukan hanya sebatas rapat koordinasi, melainkan momentum penting dalam membangun sinergi antarinstansi dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP, mengapresiasi kegiatan ini menurutnya ini adalah langkah konkret dalam membangun sinergi antar instansi dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi korupsi.

“Keterlibatan lebih dari 70 Kepala Daerah menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan memberantas korupsi di daerah,” singkatnya. (Adv)

Ancam Keselamatan Pengguna Jalan, DLH Tebang dan Rapikan Sejumlah Pohon Pelindung

Bombana, SultraNET. | Untuk memastikan keamanan pengguna jalan dari ancaman pohon tumbang atau dahan jatuh, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penebangan puluhan pohon pelindung jenis Tranbesi dengan diameter 30 cm ke atas di sejumlah tempat yang ada di Kabupaten Bombana.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sitti Arnidar menjelaskan bahwa penebangan ini dilakukan karena sejumlah pohon pelindung menghadirkan risiko bagi pengguna jalan.

“Pohon turus jalan banyak yang berisiko tumbang karena tajuknya yang tidak seimbang, dan ini dapat berisiko rawan kecelakaan. Sebagai antisipasi, kami melakukan penebangan,” ungkapnya Kamis (12/09/2023).

Arnidar menegaskan bahwa tidak semua pohon pelindung di tebang, ada juga yang dipangkas, tergantung pada posisi tajuk pohon. "Jika tajuknya condong ke jalan, kami tebang. Jika tidak, kami tetap mempertahankan," tegasnya.

Penebangan dan pemangkasan pohon pelindung sudah dilakukan dua kali sepanjang tahun 2023. Pertama kali dilakukan pada bulan April, dan kini langkah serupa diulang pada bulan Oktober, mulai dari tanggal 5 hingga 30 Oktober 2023.

Perubahan ini merupakan upaya DLH Kabupaten Bombana untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di sepanjang jalan utama Yos Sudarso. (ads)

Pj. Bupati Burhanuddin Sampaikan Selamat Pengucapan Sumpah 3 PAW Anggota DPRD Bombana

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana dengan agenda peresmian dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kab. Bombana Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019 - 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana, Senin (11/09/2023).

PAW Anggota DPRD ini dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 467, 468, 470 dan 484 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.



Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si (Kiri) saat menyampaikan sambutan

Pj. Bupati Bombana memberikan ucapan selamat atas pelantikan Muhamad Kasim D, SE, Hj. Nurmiati, Hj. Siti Maryam dan Rosnaeni serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian selama menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah kepada Akmal, S.IP, Husnul Fuadi, S.Kel, Kal Asyar, ST dan Hasan.

H. Burhanuddin dalam sambutannya berharap agar dengan pelantikan ini kinerja DPRD Kabupaten Bombana semakin meningkat dan anggota DPRD yang baru dilantik dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan cepat dalam tugas dan pengabdian yang terhormat, dalam upaya bersama untuk meningkatkan kinerja institusi dewan, sekaligus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana.

” Kami berharap pula, Anggota DPRD yang baru dapat segera memperkuat fungsi dasar DPRD yaitu Legislasi, Pengawasan dan Anggaran” tambahnya. (Kominfo)

Dorong Pengembangan Produksi Pertanian, Pemkab Bombana Serahkan Bantuan Alat dan Mesin Pasca Panen

Bombana, SultraNET. | Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Pj. Bupati Bombana, bersama jajaran Pemkab. Bombana, memberikan dorongan signifikan untuk pengembangan sarana produksi pasca panen pertanian. Acara penyerahan bantuan alat dan mesin tersebut dilaksanakan dengan penuh semangat di Penggilingan Padi Kelompok Tani Samarata, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia. Senin (11/09/2023)

Sebagai langkah nyata dukungan terhadap petani padi sawah, Pj. Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada kelompok-kelompok tani di Kabupaten Bombana. Ia menyoroti semangat luar biasa para petani yang tetap berjuang dalam situasi sulit akibat dampak fenomena El Nino ekstrim.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Burhanuddin memberikan penghargaan khusus kepada para petani yang telah berkontribusi pada keberhasilan Kabupaten Bombana dalam menjaga kestabilan inflasi. Kabupaten ini mampu menurunkan inflasi hingga 1,88%, di bawah rata-rata inflasi Sultra sebesar 3,52% dan inflasi nasional 3,08%.

Keberhasilan tersebut bahkan membawa Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna masuk dalam nominasi TPID Award dari Pemerintah pusat dan mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

Burhanuddin menjelaskan bahwa salah satu strategi dalam mengatasi inflasi daerah adalah menjaga stok ketersediaan pangan, khususnya beras. "Penyiapan sarana pasca panen juga dilakukan untuk memastikan hasil panen petani tetap di dalam wilayah Kabupaten Bombana," ujarnya.

Bantuan yang diserahkan mencakup Vertikal Drayer (Pengereng Padi), Rice Milling Unit (RMU), Colour Sorter, dan Power Thresher Mobile (PTM). Pj. Bupati Bombana berharap bantuan ini dapat memotivasi para petani untuk lebih

mengembangkan usaha tani padi sawah.

“Pemerintah Daerah akan terus mendukung melalui kegiatan-kegiatan pengembangan usaha tani dan menyediakan dukungan sarana serta prasarana sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah,” tegas Burhanuddin.

Upaya ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. (ads)

Pastikan Pelayanan Masyarakat Meningkatkan, Bupati Ruksamin Bagikan Sepeda Motor ke Seluruh Kades di Konut

Wanggudu, SultraNET. | Bupati Konawe Utara H. Ruksamin pimpin langsung apel gabungan yang laksanakan di lapangan Kantor Bupati dan hadir oleh Kepala OPD, Kabag dan Staf Lingkup Pemerintah Konawe Utara. Pada kesempatan itu Bupati juga menyerahkan unit sepeda motor kepada Para Kepala Desa (Kades) se Konawe Utara sebagai kendaraan operasional melayani kepentingan masyarakat. Senin (11/09/2023)

Dalam amanatnya Bupati membahas beberapa isu penting terkait kesehatan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang hadir dalam Apel gabungan yang semangat dan dedikasi melayani masyarakat.

“Itulah pentingnya sinergi dan kolaboritas seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama,” ujar Ruksamin.



Bupati Konut, H. Ruksamin saat membagikan unit Sepeda Motor kepada Para Kades

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan bukti APBD perubahan Pemda Konawe Utara yang sekarang sudah tembus 2 Triliun sehingga ia mewanti wanti agar seluruh OPD betul-betul memaksimalkan kinerjanya.



Bupati Konut, H. Ruksamin saat membagikan unit Sepeda Motor kepada Para

Kades

Selanjutnya dalam Apel gabungan hari ini ia secara simbolis memberikan bantuan kendaraan operasional Sepeda motor Kepada Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara yang berjumlah 35 unit.

“Hari ini secara simbolis saya berikan kendaraan operasional motor kepada para kepala Desa guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. Motor ini harus dijaga agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus maksimal,” tegasnya

Menutup amanatnya Bupati Konut dua periode itu berpesan agar para ASN dalam melaksanakan tugas terus semangat dan berkerja keras untuk mencapai visi misi pembangunan daerah.

“Untuk urusan kesejahtraan ASN biarlah saya yang pikirkan,” tutup Ruksamin yang di sambut tepuk tangan seluruh ASN yang mengikuti apel Apel gabungan itu. (S)

Bupati Ruksamin Hadiri dan Ucapkan Selamat atas Pengukuhan Pius Lustrilanang Sebagai Guru Besar Unsoed

JATENG, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut) Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, menghadiri Sidang Senat Terbuka Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Jumat (8/9/2023)

Dalam Sidang Senat Terbuka tersebut, Pius Lustrilanang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen Pemerintah Daerah.

H. Ruksamin yang hadir sebagai tamu undangan dalam sidang senat terbuka itu,

menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Pius Lustrilanang sebagai Guru Besar.

“Semoga gelar guru besar yang disematkan kepada Prof. Pius Lustrilanang berbuah berkah dan berperan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia,” ujar H.Ruksamin.



Bupati Konut Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng

Bupati Konut dua periode itu menyebut, pengukuhan guru besar tersebut dapat memberi inspirasi dan perspektif penting tentang dunia pendidikan, khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan nasional.

“Pengukuhan Prof. Pius Lustrilanang menjadi teladan atau edukasi pelecut semangat bagi generasi bangsa Indonesia untuk menjadi insan yang unggul di dunia pendidikan,” tuturnya.



Pengukuhan Prof. Pius Lustrilanang Sebagai Guru Besar Unsoed

Untuk diketahui, Prof. Pius Lustrilanang merupakan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus mantan aktivitas 98 dan juga merupakan seorang politisi asal Palembang. (S)

Calon Penerima Beasiswa Bombana Pintar di Verifikasi Faktual

Bombana, SultraNET. | Panitia Penerimaan Beasiswa Bombana Pintar mengumumkan bahwa proses verifikasi faktual untuk calon penerima beasiswa telah dimulai untuk tahap kedua.

Sekretaris Panitia, Marwia, S.Si, menjelaskan bahwa tahapan ini dilaksanakan

setelah selesai dilakukan seleksi berkas, dengan tim verifikasi yang terdiri dari 22 orang.

“Verifikasi faktual ini dilakukan dengan mendatangi langsung dan mendata calon penerima beasiswa, serta mencocokkan data yang telah kami terima,” ungkap Marwia di Sekretariat Panitia pada Kamis (07/09/2023).

Marwia menambahkan bahwa tim yang turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dilengkapi dengan kuesioner yang wajib diisi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

“Tahapan ini khusus untuk calon penerima beasiswa pintar yang telah dinyatakan lulus oleh panitia. Hasil verifikasi nantinya akan dirapatkan untuk penetapan sementara sebelum ditetapkan secara final,” bebernya.

Proses verifikasi faktual ini memastikan bahwa data yang diinput oleh calon penerima beasiswa sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ini merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa bantuan beasiswa tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah tahapan ini selesai, panitia akan melanjutkan proses seleksi hingga penetapan final penerima beasiswa tahap kedua. (ads)

Pj. Bupati Bombana Hadiri FGD Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan bersama Kejaksaan Sultra, di Kantor Gubernur Prov. Sultra dan dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Sultra, Sekda Provinsi, Inspektorat Provinsi, Bupati Kolaka, Pj. Bupati Kolaka Utara, Bupati Konawe, Bupati Konawe Selatan,

Bupati Konawe Utara dan Bupati Konawe Kepulauan. Rabu (06/09/2023)

Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. mengatakan kegiatan ini digelar untuk menindaklanjuti agenda rapat koordinasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 lalu, dan sehubungan dengan pelaksanaan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 huruf b Undang-undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“FGD ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sultra serta penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada masing-masing kepala Daerah yang disaksikan langsung oleh KPK Provinsi Sultra,” ujarnya.

Melalui kerjasama ini pihak Kejati Sultra akan memberikan bantuan dalam bentuk pendapat hukum, bantuan hukum, bantuan hukum litigasi dan non litigasi. SKK tersebut dapat digunakan sebagai penagihan hutang Pemerintah Daerah kepada sebuah lembaga atau perusahaan serta memulihkan aset Pemerintah Daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.



Kegiatan FGD Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan

Wakajati Sultra saat ditemui ditempat acara mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi Pendapatan Daerah nantinya agar oknum-oknum yang tidak membayar pajak dapat membayar dengan segera, karena ini merupakan bentuk kepentingan daerah dan imbasnya juga masyarakat yang akan merasakan.

Selain itu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Supervisi KPK Ely Kusumastuti mengatakan sektor pertambangan di Sultra sangat potensial namun disayangkan pihak pertambangan seringkali menunggak pajak. Dan pihaknya akan segera menindaklanjuti tunggakan pajak daerah yang disebabkan oleh pihak pertambangan.

Pihaknya lebih fokus kepada kepatuhan wajib pajak, terutama sektor pertambangan yang sudah menunggak.

“Kita lebih fokus kesitu, kita bersinergi, kita berkolaborasinya kesitu dengan harapan supaya pajak yang menunggak terbayar. Kita akan tempuh tahap non litigasi dulu, kalau tidak berhasil kita tempuh tahap litigasi kita gugat perdata.” tandasnya. (Adv)